

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Pustaka

Berikut ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu sebagai dasar penentu penulis dalam menyusun skripsi ini:

**Adhitya Kusumaningrum** (2007), “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Propinsi DKI Jakarta”, dengan menggunakan alat analisis metode regresi linier berganda. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah suku bunga, inflasi, *lag* PDRB, nilai tukar dan tingkat upah secara signifikan berpengaruh positif terhadap investasi di Propinsi DKI Jakarta.

**Astiti Swanitarini** (2016), melakukan penelitian berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia tahun 2011-2014”, dengan menggunakan alat analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMP dan Nilai ekspor berpengaruh signifikan dan positif terhadap investasi asing langsung.

**Beatriks Sefle, Amran Naukoko dan George Kawung** (2014), melakukan penelitian berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Kabupaten Sorong (Studi pada Kabupaten Sorong tahun 2008-2012)”, dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pengujian dengan analisis regresi berganda melalui tiga variabel bebas yakni tenaga kerja, PDRB, tingkat suku bunga, memiliki pengaruh terhadap investasi kabupaten Kota Sorong dan secara bersama-sama atau simultan PDRB memiliki pengaruh terhadap Invesatasi.

**J.J Sarungu dan Maharsi Endah K** (2013), melakukan penelitian berjudul “Analisis faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia tahun 1990-2010 : Metode ECM”, dengan menggunakan analisis time series dengan pendekatan ECM. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis menggunakan ECM menunjukkan bahwa variabel suku bunga kredit investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi dalam jangka pendek.

**Sasana Hadi** (2008), melakukan penelitian berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi swasta di Jawa Tengah”, dengan menggunakan alat analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya adalah tingkat suku bunga memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan investasi swasta di Jawa Tengah. Tingkat inflasi memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap investasi swasta di Jawa Tengah. Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan investasi swasta di Jawa Tengah.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Investasi**

Investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh para penanam modal untuk menunjang kegiatan produksi berupa peralatan, gedung, peralatan produksi dan mesin-mesin baru lainnya dan persediaan yang nantinya akan memberikan keuntungan dari investasi tersebut. Menurut Samuelson *et al* (1998), hal utama yang menentukan investasi adalah hasil biaya investasi yang ditentukan oleh

kebijakan tingkat bunga dan pajak, serta harapan mengenai keuntungan yang didapat dari investasi di masa depan.

Menurut Harjono (2007), investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh pribadi maupun badan hukum dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Lebih lanjut dalam Hartono (2007) dikatakan bahwa unsur-unsur penting dari kegiatan investasi adalah :

- a. Terdapatnya faktor guna meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya.
- b. Modal tidak hanya mencakup hal yang bersifat kasat mata dan tidak dapat diraba tetapi juga mencakup keahlian, pengetahuan, jaringan data, dan sebagainya dalam berbagai kontrak kerja sama.

### **2.2.2 Pengertian Tenaga Kerja**

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2). Penduduk dalam suatu negara dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja.

- a. Berdasarkan penduduk, tenaga kerja dapat dikelompokkan meliputi :

- 1) Tenaga kerja

Ini adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut UU No. 13

tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 usia tenaga kerja yaitu antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

2) Bukan Tenaga Kerja

Ini adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, walaupun ada permintaan tenaga kerja. Mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun adalah kelompok pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak (Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003).

b. Berdasarkan batas kerja dikelompokkan menjadi:

1) Angkatan Kerja

Merpakan penduduk usia produktif berusia 15-64 tahun yang sementara tidak bekerja, maupun yang sedang mencari lapangan pekerjaan.

2) Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang masih bersekolah, menjadi ibu rumah tangga dan sebagainya.

c. Berdasarkan kualitasnya dikelompokkan menjadi:

1) Tenaga Kerja Terdidik

Merupakan tenaga kerja yang memiliki skil atau keahlian dalam bidang tertentu dengan cara bersekolah atau mengikuti pendidikan formal dan non formal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

2) Tenaga Kerja Terlatih

Merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan membutuhkan pengalaman kerja. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

3) Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih

Merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian khusus dan hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

### 2.2.3 Pengertian PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penjumlahan nilai tambah barang atau jasa dalam perekonomian suatu daerah di waktu tertentu (BPS, 2016). Untuk menghitung PDRB ada dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku padatahun yang telah di tentukan , sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2000.

Di bawah ini adalah empat metode pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghitung PDRB sebagai berikut :

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini dilakukan dengan mengurangi besarnya nilai output yang telah dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan biaya dari nilai produksi.

b. Pendekatan Pendapatan

Perhitungan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi seperti upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak. Kemudian untuk sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha (bunga neto, sewa tanah dan keuntungan) tidak diperhitungkan.

c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini digunakan guna mengetahui penjumlahan dari seluruh komponen pengeluaran akhir. Nilai yang diperhitungkan diantaranya adalah nilai barang dan jasa yang digunakan masyarakat atau pemerintah dalam keperluan konsumsi rumah tangga.

d. Metode Alokasi

Metode alokasi ini dihitung dengan menggunakan data yang telah dialokasikan dari sumber yang tingkatannya lebih tinggi, misalnya data suatu kabupaten diperoleh dari alokasi data provinsi.

PDRB disajikan secara berkala guna menggambarkan perkembangan ekonomi suatu negara. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral. Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Kemudian pendapatan per kapita yang diperoleh dari perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan untuk membanding tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk

melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi. Dengan demikian Pendapatan Regional yang disajikan secara berkala akan dapat diketahui tentang tingkat pertumbuhan ekonomi, gambaran struktur perekonomian, perkembangan pendapatan per kapita, tingkat kemakmuran masyarakat, dan tingkat inflasi dan deflasi.

#### **2.2.4 Pengertian Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang telah direncanakan dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, demi menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 1994). Kemudian menurut Kartasmita (1994) diartikan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Berdasarkan kedua pengertian di atas maka infrastruktur dapat diartikan sebagai prasarana atau segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terlaksananya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dan lain-lain.

##### **a. Ruang Lingkup Pembangunan Infrastruktur**

Keberadaan infrastruktur sangat penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sarana dan prasarana fisik

merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat.

Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Berbagai hal seperti energi, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan

jaringan layanan air bersih, kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal (Soemardi dan Wirahadikusumah, 2009). Ruang lingkup pembangunan infrastruktur antara lain meliputi :

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu;
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan.
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

b. Bentuk Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

Hal ini menjadi sebuah pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada rakyat sebagai unsur pembangunan nasional. Pemerintah telah mengalokasikan APBN di bidang infrastruktur khususnya jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum. Untuk Pemerintah Daerah, dana untuk pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam APBD

masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yaitu bahwa: "*Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program*".

Apabila Pemerintah Daerah tidak mampu membiayai pembangunan jalan secara keseluruhan maka Pemerintah Pusat akan membantu, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) dan (3) PP No. 34 Tahun 2006 yang menyebutkan :

(2) *“Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri”.*

Kebutuhan dana infrastruktur antara lain bisa diperoleh dari :

1. Dana Masyarakat yaitu dari pajak
2. Pinjaman luar negeri dengan bunga yang telah disepakati
3. Sumber-sumber dana yang lain

#### **2.2.5 Pengertian Ekspor**

Ekspor merupakan proses pengeluaran barang dan komoditas pada suatu negara ke negara lain. Kegiatan ekspor diantaranya adalah:

a. Ekspor langsung

Cara ini dilakukan dengan menjual barang atau jasa melalui perantara/ eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Keuntungan dari ekspor langsung adalah produksi terpusat di negara asal dan dapat dikontrol langsung oleh distribusi pengekspor dengan

lebih baik. Sedangkan Kelemahannya adalah biaya transportasi lebih tinggi untuk produk dalam skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme.

b. Ekspor tidak langsung

Cara ini di mana barang dijual melalui perantara/eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara tersebut. Melalui, perusahaan manajemen ekspor dan perusahaan pengeksportir. Kelebihannya, sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Kelemahannya, kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain kurang.

## **2.3 Hubungan Variabel Penelitian**

### **2.3.1 Hubungan Investasi dengan Tenaga Kerja**

Jika penduduk secara ekonomi aktif dan berpotensi dapat menghasilkan barang dan jasa maka dapat dikatakan sebagai tenaga kerja, sehingga tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan hasil produksi. Peningkatan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi tersebut nantinya akan meningkatkan pula investasi. Seperti yang dikatakan dalam Husnainy (2008) yang menyatakan bahwa hubungan tenaga kerja terhadap investasi adalah positif.

### **2.3.2 Hubungan Investasi dengan PDRB**

Investasi menjadi fungsi tersendiri dalam pendapatan nasional, maka investasi di daerah merupakan fungsi pendapatan regional daerah. Hubungan antara PDRB dan investasi bersifat positif, yang artinya jika investasi cenderung meningkat maka PDRB juga meningkat.

### **2.3.3 Hubungan Investasi dengan Infrastruktur**

Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan semakin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat. Kegiatan investasi tidak akan berjalan apabila tidak adanya ketersediaan infrastruktur, karena para investor akan berfikir dua kali untuk berinvestasi, namun apabila ketersediaan infrastruktur memadai maka para investor akan berminat untuk menanamkan modalnya.

### **2.3.4 Hubungan investasi dengan Ekspor**

Berdasarkan penelitian Levine dan Renelt (1992) dalam Alam (2003) diperoleh bukti bahwa perbandingan antara ekspor dengan PDRB memiliki hubungan yang sangat kuat dengan perbandingan antar investasi dan PDRB.

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

Dalam penjelasan rumusan masalah dapat dibuat beberapa hipotesis yang menjadi landasan dalam penelitian :

1. Diduga variabel tenaga kerja berpengaruh positif terhadap investasi di Propinsi D.I Yogyakarta.
2. Diduga variabel PDRB berpengaruh positif terhadap investasi di Propinsi D.I Yogyakarta.
3. Diduga variabel infrastruktur berpengaruh positif terhadap investasi di Propinsi D.I Yogyakarta.
4. Diduga variabel ekspor berpengaruh positif terhadap investasi di Propinsi D.I Yogyakarta.